

Heru Budi: KJMU Sudah Tepat Sasaran

JAKARTA (IM) - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengklaim telah memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sesuai sasaran. KJMU, ujarnya, disalurkan untuk masyarakat tak mampu.

Heru menyebut dalam memberikan KJMU, pihaknya mengacu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut telah melalui proses penyesuaian sejak November-Desember 2023.

“Yang penting Pemda DKI memberikan bantuan ini ke tepat sasaran. Sehingga data dasarnya ada di DTKS,” ujar Heru di Bali Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Selain itu, pihaknya menyalurkan dengan data Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) DKI. Sehingga KJMU dipastikan tidak diterima oleh masyarakat yang mampu.

“Dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yang mampu masa kita berikan bantuan? Padahal dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yg memang layak secara data,” terangnya.

Heru menyebut dalam memberikan KJMU, pihaknya mengacu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut telah melalui proses penyesuaian sejak November-Desember 2023.

“Yang penting Pemda DKI memberikan bantuan ini ke tepat sasaran. Sehingga data dasarnya ada di DTKS,” ujar Heru di Bali Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Selain itu, pihaknya menyalurkan dengan data Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) DKI. Sehingga KJMU dipastikan tidak diterima oleh masyarakat yang mampu.

“Dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yang mampu masa kita berikan bantuan? Padahal dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yg memang layak secara data,” terangnya.

Penyesuaian Tarif Integrasi Jalan Tol Japek dan MBZ Diberlakukan 9 Maret

JAKARTA (IM) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) memberlakukan penyesuaian tarif integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) mulai Sabtu 9 Maret.

“Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol,” ujar Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo di Jakarta, Rabu (6/3).

“Kami terus melakukan upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, peningkatan kualitas jalan tol dan melakukan inovasi pelayanan jalan tol guna menjaga kelangsungan usaha yang berkelanjutan,” katanya.

Guna terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah melakukan penambahan lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menyediakan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Sebagai kompensasi atas pekerjaan tersebut dan penyesuaian terhadap inflasi, mulai 9 Maret 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif integrasi pada kedua jalan tol tersebut.

Adapun komponen utama penyesuaian tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023

Ramai

Baru-baru ini, akun Disdik DKI di Instagram diramaikan warga yang mengeluh lantaran dicoret dari penerima KJP Plus dan KJMU. Salah satu warganet mengeluhkan nama anaknya dihapus dari penerima KJMU di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik.

“Gimana nasib KJMU anak saya yang tiba-tiba dihapus, padahal orang tua kerja pedagang, serabutan, buat hari-hari saja susah,” tulis akun yelokol_02 di Instagram.

“Abaah Hak KJMU kami dicabut sama Pj DKI dan sekarang Ribuan Mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya,” tulis akun itu.

Dengan kebijakan KJMU yang dicabut, banyak mahasiswa asal Jakarta yang berpotensi tak bisa melanjutkan kuliah karena tak mendapat bantuan sosial biaya pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan indikator pemeringkatan kesejahteraan (Desil). Pemeringkatan itu dinilai menjadi kewenangan produsen data.

Purwosusilo menambuhkan, bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4).

“Bagi masyarakat yang terdapat dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 (kategori keluarga mampu) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU. Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan dan ketentuan yang berlaku ini,” kata dia. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



JUSUF KALLA HADIRI GERAKAN MASJID BERSIH DI JAKARTA

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/3). Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut Ramadhan.

Fantastis, Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Jakarta Tembus Rp3 Miliar

Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tak mau memberikan penjelasan soal Pemprov DKI yang menganggarkan Rp3.086.890.132, untuk membeli pakaian dinas dan atribut baru bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Wah silakan itu tanya sama Sekwan,” katanya.

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menganggarkan dana yang cukup fantastis untuk pembelian baju dinas anggota dewan periode 2024-2029. Anggaran sebesar Rp3.086.890.132 akan dialokasikan untuk membeli baju 106 anggota dewan DKI Jakarta yang terhormat.

Artinya, setiap anggota DPRD DKI akan menerima pakaian baru senilai sekitar

Rp29 juta. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Agustinus, nilai anggaran tersebut mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,8 miliar pada 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pembelian seragam dan atribut berupa pin anggota dewan yang terbuat dari emas. “Benar ada kenaikan anggaran, karena ada pemberian

atribut pin emas kepada anggota dewan yang baru, ini tapi hanya lima tahun sekali. Anggaran pembelian pin emas mencapai Rp1,5 miliar,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/3).

Peningkatan anggaran untuk seragam dinas anggota DPRD DKI dapat dilihat melalui Situs Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah (SIRUP LKPP). Dengan total anggaran mencapai Rp3 miliar lebih, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024.

Anggaran yang cukup fantastis ini jauh meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 yang hanya sebesar Rp1,8 miliar. Agustinus menjelaskan bahwa penganggaran seragam dan atribut anggota DPRD DKI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administrasi Dewan, serta Pasal 12 dan PP 18 yang menyatakan bahwa pimpinan dan anggota dewan dapat menerima pakaian dinas dan atribut.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian seragam dinas baru dan atribut berupa pin anggota DPRD DKI yang terbuat dari emas. Setiap anggota dewan untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 akan menerima 2 pin emas dengan berat 5 dan 7 gram, yang akan disematkan saat pelantikan pada bulan Agustus 2024 mendatang.

Agustinus menekankan bahwa penganggaran ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diterima, anggaran untuk seragam anggota DPRD DKI pada 2022 tercatat sebesar Rp1,7 miliar, mengalami peningkatan menjadi Rp1,8

miliar pada 2023. Namun, pada 2024 ini, DPRD DKI justru menetapkan anggaran fantastis sebesar Rp3 miliar untuk kebutuhan seragam dewan.

Sementara Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tak ingin memberikan penjelasan soal Pemprov DKI yang menganggarkan Rp 3.086.890.132, untuk membeli pakaian dinas dan atribut baru bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku tak mengetahui secara rinci anggaran baju dinas dan pin emas untuk anggota DPRD DKI yang baru. “Wah itu tanya sama Sekwan. Detailnya kan saya tidak tahu,” ujar Heru kepada wartawan di kawasan Cilincing Jakarta Utara, Rabu (6/3). ● yan

Pj Gubernur Heru Baru Tahu Jakarta Tak Lagi Berstatus DKI

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku baru mengetahui apabila Jakarta kini sudah tidak berstatus Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Heru Budi meminta masyarakat menunggu proses transisi dan untuk melihat secara seksama proses pembuatan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi ketika ditanya awak media usai menghadiri program sembako murah di kantor Kecamatan Cilincing pada Rabu (6/3).

Awalnya awak media bertanya perihal saat ini status DKI Jakarta sejak 15 Februari 2024 sudah tidak ada. Sedangkan status DKJ belum didapatkan karena Undang-Undang DKJ belum selesai dibuat.

“Undang-undang DKJ kan belum di... (tidak meneruskan ucapan),” ujar Heru Budi.

Awak media pun kembali bertanya dampak dan implikasi dari tidak adanya status istimewa atau khusus pada Provinsi Jakarta kepada Heru Budi Hartono.

Pasalnya Heru Budi Hartono diketahui juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (KSP) dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tengah berambisi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Ya masih ada waktu transisi. Kan sedang berproses DKJ ya,” pungkas Heru Budi Hartono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI baru akan mempercepat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah menerima Daftar In-

ventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Ketua Baleg DPR Supratman mengungkapkan saat ini Jakarta telah kehilangan status sebagai daerah khusus ibu kota (DKI).

“Masalahnya begini, RUU DKI itu dia kehilangan statusnya sejak 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-Undang IKN. Nah, itu kan berakhir 15 Februari,” kata Supratman kepada awak media di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pembahasan RUU DKJ seiring hilangnya status Jakarta.

Meski demikian pembahasan terkait DKJ kata dia tengah menyorot perihal apakah Gubernur Jakarta akan dipilih secara langsung oleh rakyat atau ditunjuk Presiden melalui DPR.

“Sekarang DKI ini nggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat. Nah, pikiran-pikiran terhadap kekhususan itulah yang melahirkan gagasan, salah satunya menyangkut soal Pasal 10 (Pemilihan Gubernur Jakarta). Karena kan namanya daerah khusus. Di samping kekhususannya itu untuk sektor ekonomi, keuangan, pusat industri, dan lain-lain,” kata dia.

Supratman mengungkapkan Baleg DPR RI akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah membahas RUU itu pada 7 Maret 2024 dan ditargetkan RUU DKJ rampung dalam kurun waktu 10 hari.

“Kalau bisa kami mau selesaikan dalam, kalau kita bisa lakukan raker lusa, umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja harus selesai, karena, DKI sudah kehilangan status,” pungkasnya. ● yan

PENERTIBAN TROTOAR DI KEMANG JAKSEL

20 PKL Diberi Kartu Kuning dan 18 Motor Dicabut Pentil

JAKARTA (IM) - Satpol PP menertibkan trotoar di Jalan Kemang Raya, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dari pedagang kaki lima (PKL) dan sepeda motor yang parkir sembarang, sehingga akses pejalan kaki terganggu. Petugas menindak 20 PKL dengan diberikan kartu kuning dan 18 motor dicabut pentilnya.

“Kami lakukan bulan terbit trotoar di kawasan Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, yang mana kami lakukan penindakan pada pedagang yang tak tertib,” ujar Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti pada wartawan, Rabu (6/3).

Penertiban dilakukan pada Selasa 5 Maret 2024

tersebut dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Pergub DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009, Pergub DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2003, dan Keputusan Kasatpol PP DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024.

“Tujuannya untuk mengembalikan fungsi trotoar menjadi tempat yang nyaman bagi pejalan kaki. Mewujudkan trotoar yang nyaman, aman, tertib, dan bersih sebagai fasilitas pelayanan kepada masyarakat,” tutur Nanto.

Dia menambahkan, sasaran dalam penindakan tersebut di antaranya PKL hingga kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar di kawasan

Jakarta Selatan. Bulan terbit tersebut bakal dilakukan secara berkelanjutan nantinya di 10 Kecamatan di kawasan Jakarta Selatan, yakni Tebet, Setiabudi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilindak, Pancoran, Jagakarsa, dan Pesanggrahan.

Adapun penindakan tersebut dilakukan dengan peringatan tertulis, cabut pentil hingga dilakukan penertiban.

Pada penertiban di hari pertama kemarin, ada puluhan pedagang dan belasan kendaraan yang ditindak.

“20 pedagang atau PKL diberikan Kartu Kuning, 18 kendaraan (roda dua) dilakukan cabut pentil,” katanya. ● yan

FOTO: ANTARA



BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG PERWIIRA PERTAMINA

Gedung Perwira yang terletak di kompleks Kantor Pusat lama PT Pertamina, Jakarta, Rabu (6/3), berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993, merupakan bangunan cagar budaya.